

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah dengan luas cukup besar di Indonesia, yaitu 32.548 km². Terletak di bagian tengah Pulau Jawa, provinsi ini berbatasan langsung dengan Jawa Barat di sebelah barat dan Jawa Timur di sebelah timur. Dengan luas tersebut, Jawa Tengah mencakup sekitar 25% dari total luas Pulau Jawa, namun hanya sekitar 1,7% dari keseluruhan luas Indonesia (Putri et al., 2023).

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia, Jawa Tengah tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,93%, yang didorong oleh sektor industri, perdagangan, dan pertanian. Kota-kota seperti Semarang, Surakarta, Kudus, dan Jepara mengalami perkembangan kawasan industri yang pesat, menciptakan aglomerasi ekonomi yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan daerah (Enggano, 2023). Aglomerasi ini mencerminkan peningkatan efisiensi ekonomi akibat pemusatan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah tertentu (Nainggolan, 2024).

Sebagai langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah menetapkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) KEDUNGSEPUR yang mencakup Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kabupaten Grobogan. Kawasan ini, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022, diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan infrastruktur dan sistem transportasi (Sukmawati & Robertus, 2023).

Transportasi memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Moda transportasi darat, khususnya angkutan umum, berperan penting dalam memperlancar mobilitas masyarakat secara cepat, aman, nyaman, dan terjangkau (Indi & Putri, 2022). Angkutan aglomerasi yang mengintegrasikan kawasan industri, permukiman, dan pusat perdagangan bertujuan meningkatkan efisiensi mobilitas serta kesejahteraan masyarakat (Lailatul Fitri & Cikusin, 2023).

Salah satu moda transportasi massal yang dikembangkan untuk menunjang mobilitas masyarakat adalah Bus Rapid Transit (BRT). BRT dirancang dengan infrastruktur khusus untuk meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi waktu tunggu, serta menyediakan sistem pembayaran yang lebih praktis dan terjangkau (Breithaup et al., 2017). Kualitas pelayanan transportasi publik menjadi faktor penting dalam menarik minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. (Tjiptono, 2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dalam memenuhi kebutuhan pengguna layanan.

Sebagai salah satu moda transportasi umum yang beroperasi di Jawa Tengah, Trans Jateng diharapkan memiliki kinerja pelayanan yang optimal untuk memberikan layanan yang lancar, aman, nyaman, andal, serta terorganisir dengan baik. Standar pelayanan Trans Jateng mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum, yang mencakup aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Trans Jateng Koridor Semarang-Grobogan telah beroperasi selama dua tahun dan menunjukkan peningkatan jumlah penumpang yang cukup signifikan. Pada tahun pertama operasionalnya di tahun 2021, *load factor* Trans Jateng Koridor Semarang-Grobogan tercatat sebesar 54%, dan meningkat menjadi 90% pada tahun 2024. Koridor ini memiliki rute yang mencakup Terminal Penggaron, Terminal Gubug, dan Terminal Godong dengan total panjang rute mencapai 50,2 km dalam satu arah dan 18,6 km dalam arah sebaliknya. Dengan jumlah armada sebanyak 14 bus dan ritase sebanyak enam kali perjalanan per hari, koridor ini memiliki 70 titik pemberhentian yang tersebar di sepanjang jalur layanan (Balai Transportasi Jawa Tengah, 2024).

Namun, untuk memastikan bahwa layanan Trans Jateng Koridor Semarang-Grobogan telah memenuhi standar pelayanan yang optimal, diperlukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Evaluasi ini mencakup efisiensi operasional

dan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015. Melalui evaluasi yang menyeluruh, diharapkan layanan Trans Jateng dapat lebih dioptimalkan sehingga semakin banyak masyarakat yang beralih ke transportasi umum, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta membantu mengatasi permasalahan kemacetan dan polusi udara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan Bus Trans Jateng Koridor VI Semarang-Grobogan. Evaluasi ini akan menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi peningkatan kualitas layanan agar lebih memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung kebijakan transportasi berkelanjutan di Jawa Tengah.

I.2. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana analisis kinerja pelayanan Bus Trans Jateng Koridor VI berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2015?
2. Bagaimana analisis kinerja operasional pada Trans Jateng Koridor VI?
3. Apa rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan Trans Jateng Koridor VI?

I.3. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian, penelitian memerlukan batasan. Berikut batasan-batasan masalah tersebut:

1. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi kinerja pelayanan dan operasional Bus Trans Jateng Koridor VI.
2. Evaluasi kinerja pelayanan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan.

I.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi kinerja pelayanan Bus Trans Jateng Koridor VI berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2015.
2. Menganalisis kinerja operasional menggunakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/A.J.206/DRJD/2002.
3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan Trans Jateng Koridor VI.

I.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut.

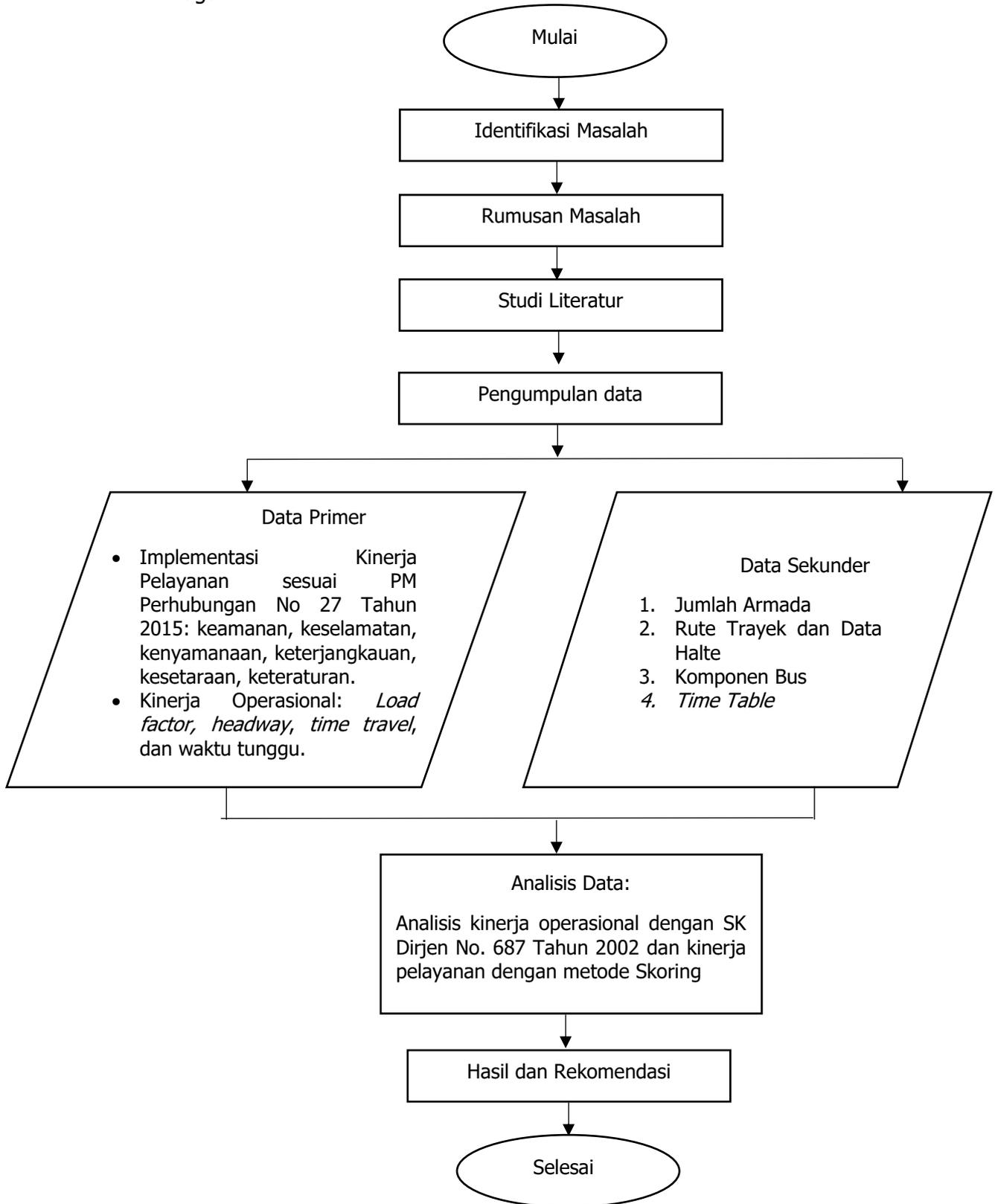
1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum di Jawa Tengah.
2. PT. Purwo Gumilar PWD
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi operator Trans Jateng dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.
3. Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang.
4. Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi akademik bagi mahasiswa yang tertarik meneliti transportasi umum dan evaluasi kinerjanya.

I.6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan Magang ini dimulai pada tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 12 Februari 2024 bertempat pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

I.7. Sistematika Penulisan

1. Bagan Alir



Gambar 1. 1 Diagram Alir

2. Prosedur Pengambilan Data

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena atau perilaku di lapangan. Metode ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mencatat peristiwa sebagaimana adanya di situasi nyata, tanpa melakukan intervensi atau memengaruhi keadaan yang diamati (Romdona et al., 2024). Dalam penelitian ini, metode observasi dilakukan dengan survei langsung ke lapangan untuk mengamati kondisi kinerja pelayanan bus dan halte Bus Trans Jateng Koridor VI. Pengamatan difokuskan pada seluruh indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2015 dan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 687 Tahun 2002. Selain itu, data penelitian juga diperoleh melalui metode studi dokumentasi dengan mengumpulkan informasi yang relevan dari instansi terkait guna mendukung hasil observasi.

3. Teknik Analisis Data

Metode skoring digunakan untuk menilai kinerja pelayanan Bus Trans Jateng Koridor VI dengan memberikan skor pada setiap parameter variabel kinerja pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015. Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan membandingkan indikator pelayanan terhadap standar yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut (Lendeon et al., 2021).

Metode analisis kinerja operasional menggunakan data sekunder dan data primer yang telah diperoleh kemudian dihitung berdasarkan standar kerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Nomor: SK.687/AJ.206/DRDJ/2002. Perhitungan ini bertujuan untuk menentukan nilai kecepatan, *load factor*, dan waktu antara.